



UNIVERSITAS NASIONAL

**AKSI KOLEKTIF PENOLAKAN KEBIJAKAN PAJAK
DAERAH SEBAGAI INDIKATOR KRISIS LEGITIMASI
POLITIK DI KABUPATEN PATI TAHUN 2025**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S.Sos)

OKKA ANDRIANSYAH

223501516011

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS NASIONAL**

2026



NATIONAL UNIVERSITY

**COLLECTIVE ACTION REJECTING LOCAL TAX POLICIES
AS AN INDICATOR OF POLITICAL LEGITIMACY CRISIS
IN PATI REGENCY 2025**

SKRIPSI

Submitted as partial fulfilment of the requirements for the Bachelor (S.Sos)

OKKA ANDRIANSYAH

223501516011

**POLITICAL SCIENCE
FACULTY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCE
NATIONAL UNIVERSITY**

2026



UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JAKARTA

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Okka Andriansyah

NPM : 223501516011

Program Studi : Ilmu Politik

Judul Skripsi : AKSI KOLEKTIF PENOLAKAN KEBIJAKAN PAJAK
DAERAH SEBAGAI INDIKATOR KRISIS LEGITIMASI
POLITIK DI KABUPATEN PATI TAHUN 2025

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli saya sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang penuh diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Nasional atau perguruan tinggi lainnya.

Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik dengan peraturan yang berlaku di Universitas Nasional. Demikian pernyataan ini saya buat.

Jakarta, 13 Februari 2026

Yang membuat pernyataan,

Okka Andriansyah



UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JAKARTA

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Okka Andriansyah
Nomor Pokok Mahasiswa : 223501516011
Program Studi : Ilmu Politik
Kekhususan : Politik Indonesia
Judul Skripsi : AKSI KOLEKTIF PENOLAKAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH SEBAGAI INDIKATOR KRISIS LEGITIMASI POLITIK DI KABUPATEN PATI TAHUN 2025
Diajukan Untuk : Memenuhi salah satu dari persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nasional

Disetujui untuk diajukan,
Jakarta, 13 Februari 2026

Dosen Pembimbing

Dr. Diana Fawzia, M.A.

Ketua Program Studi Ilmu Politik

Yusuf Wibisono, S.IP., M.Si.



UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JAKARTA

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Okka Andriansyah
Nomor Pokok Mahasiswa : 223501516011
Program Studi : Ilmu Politik
Kekhususan : Politik Indonesia
Judul Skripsi : AKSI KOLEKTIF PENOLAKAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH SEBAGAI INDIKATOR KRISIS LEGITIMASI POLITIK DI KABUPATEN PATI TAHUN 2025
Diajukan Untuk : Memenuhi salah satu dari persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nasional

Disetujui untuk diajukan,

Jakarta, 13 Februari 2026

Dosen Pembimbing

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik

Dr. Diana Fawzia, M.A.



Dr. Aos Yuli Firdaus, S.I.P., M.Si.

ABSTRAK

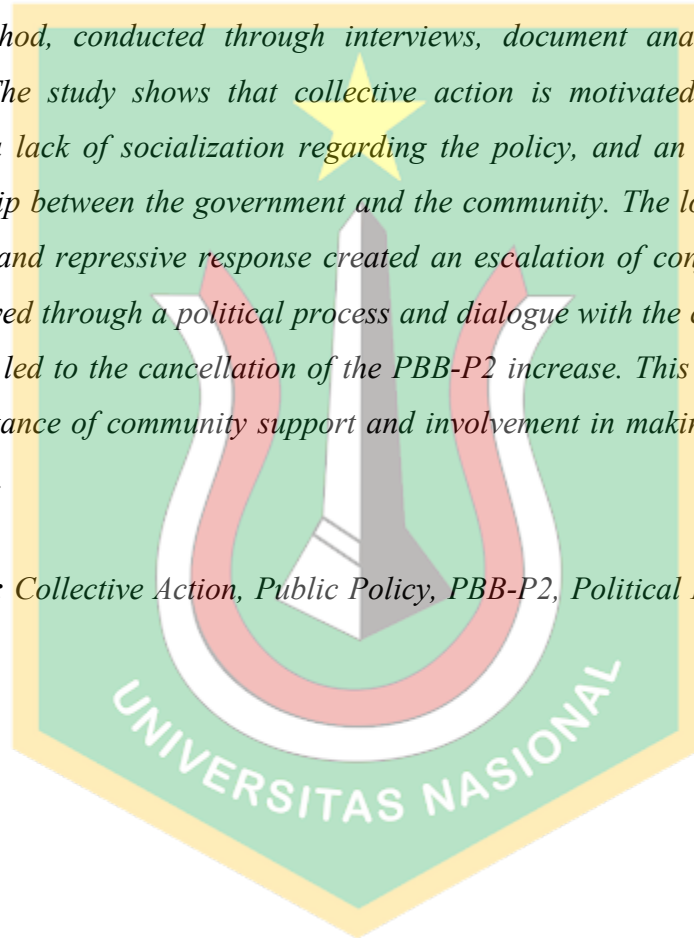
Penelitian ini meneliti mengenai cara masyarakat melakukan aksi kolektif dalam menolak kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan serta perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Pati, serta bagaimana pemerintah daerah memberikan tanggapan dalam menangani permasalahan yang ada. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor sosial dan politik yang mendorong masyarakat melakukan aksi kolektif, serta mempelajari dampak dan cara mengatasi konflik yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, dilakukan melalui wawancara, analisis dokumen, serta pemberitaan dari media. Penelitian menunjukkan bahwa tindakan kolektif dilatarbelakangi oleh dasar atas kebijakan fiskal yang tidak adil, kurangnya sosialisasi mengenai kebijakan, serta ketidakseimbangan dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Respon pemerintah daerah yang bersifat defensif dan represif menciptakan eskalasi konflik yang berlebih. Konflik tersebut diselesaikan melalui proses politik dan dialog bersama masyarakat, yang pada akhirnya berujung pada pembatalan kenaikan PBB-P2. Penelitian ini menekankan betapa pentingnya dukungan masyarakat dan keterlibatan mereka dalam membuat kebijakan fiskal di daerah.

Kata Kunci: Aksi Kolektif, Kebijakan Publik, PBB-P2, Legitimasi Politik, Politik Lokal.

ABSTRACT

This study examines how communities engage in collective action to reject the policy of increasing rural and urban land and building tax (PBB-P2) in Pati Regency, as well as how local governments respond to the existing problems. This study aims to analyze the social and political factors that encourage communities to engage in collective action, as well as to examine the impact and ways of resolving existing conflicts. This study uses a qualitative approach with a case study method, conducted through interviews, document analysis, and media reports. The study shows that collective action is motivated by unfair fiscal policies, a lack of socialization regarding the policy, and an imbalance in the relationship between the government and the community. The local government's defensive and repressive response created an escalation of conflict. The conflict was resolved through a political process and dialogue with the community, which ultimately led to the cancellation of the PBB-P2 increase. This study emphasizes the importance of community support and involvement in making fiscal policy in the region.

Keywords: *Collective Action, Public Policy, PBB-P2, Political Legitimacy, Local Politics.*



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GRAFIK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Pertanyaan Penelitian	4
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
1.5 Sistematika Penulisan	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
2.2 Teori/Konsep	9
2.2.1 Teori Partisipasi Politik (Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson)	10
2.2.1.1 Partisipasi Politik Konvensional	10
2.2.1.2 Partisipasi Politik Non-Konvensional	11
2.2.1.3 Partisipasi Politik Digital	11
2.2.2 Teori <i>New Social Movements</i>	12
2.2.2.1 Kelompok Anomi	13
2.2.2.2 Kelompok Non-asosiasional	14
2.2.2.3 Kelompok Asosiasional	14
2.2.2.4 Kelompok Institusional	15
2.2.2.5 LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)	16

2.2.3 Teori Sistem Politik (Gabriel A. Almond).....	17
2.2.3.1 <i>Input</i>	19
2.2.3.2 <i>Output</i>	19
2.2.3.3 Umpan Balik (<i>feedback</i>)	19
2.3 Kerangka Pemikiran	20
BAB III METODE PENELITIAN	23
3.1 Pendekatan Penelitian	23
3.2 Jenis dan Sumber Data	23
3.2.1 Data Primer	24
3.2.2 Data Sekunder	24
3.3 Teknik Pengumpulan Data	24
3.3.1 Wawancara Mendalam (In Depth Interview)	24
3.3.2 Studi Dokumentasi	25
3.4 Teknik Keabsahan Data	25
3.4.1 Triangulasi Sumber	25
3.4.2 Member Check	26
3.4.3 Audit Trail	26
3.5 Teknik Analisis Data	26
BAB IV GAMBARAN UMUM	27
4.1 Geografis Kabupaten Pati	27
4.2 Demografis Kabupaten Pati	29
4.3 Kondisi Ekonomi Kabupaten Pati	34
4.4 Kondisi Sosial-Kultural Masyarakat Kabupaten Pati	36
4.5 Kondisi Kultur Politik Masyarakat Kabupaten Pati	37
4.5.1 Sejarah Politik Lokal Kabupaten Pati	38
4.5.2 Partai Politik dan Representasi di DPRD Kabupaten Pati	38
BAB V ASPEK SOSIAL DAN POLITIK DALAM MUNCULNYA AKSI KOLEKTIF MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN PBB-P2 KABUPATEN PATI	41
5.1 Faktor Sosial sebagai Pemicu Aksi Kolektif Masyarakat	41
5.1.1 Beban Ekonomi dan Persepsi Ketidakadilan Fiskal	42
5.1.2 Lemahnya Sosialisasi dan Partisipasi Publik	44

5.1.3 Solidaritas Sosial dan Identitas Komunitas Lokal	46
5.2 Faktor Politik dalam Terbentuknya Aksi Kolektif	48
5.2.1 Ketimpangan Relasi Kekuasaan antara Pemerintah dan Masyarakat	49
5.2.2 Peran Aktor Penggerak Aksi (LSM, Tokoh Lokal, Aktivis)	51
5.2.3 Kegagalan Pemerintah dalam Membangun Legitimasi Kebijakan	53
BAB VI RESPON PEMERINTAH, DAMPAK SOSIAL-POLITIK DAN PENYELESAIAN KONFLIK KEBIJAKAN PBB-P2	56
6.1 Respon Pemerintah Daerah terhadap Aksi Kolektif Masyarakat	56
6.1.1 Tahapan Respon Pemerintah Daerah	57
6.1.2 Peran DPRD Kabupaten dalam Eskalasi dan Mediasi Konflik	61
6.2 Dampak Sosial dan Politik Pasca Aksi Kolektif	66
6.2.1 Dampak Sosial	66
6.2.2 Dampak Politik Lokal	69
6.3 Bentuk Penyelesaian Konflik antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat	72
6.3.1 Dialog Publik dan Negosiasi Kebijakan	72
6.3.2 Pembatalan Kenaikan PBB-P2	74
6.3.3 Pelengseran Bupati Pati sebagai Konsekuensi Krisis Legitimasi Politik Lokal	76
BAB VII PENUTUP	80
7.1 Kesimpulan	80
7.2 Manfaat Penelitian	81
DAFTAR PUSTAKA	82
DAFTAR LAMPIRAN	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Kabupaten Pati.....	27
Gambar 5.1 Demonstrasi Warga Pati.....	47
Gambar 5.2 Propaganda Media Sosial.....	47



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Karakteristik Geografis Kabupaten Pati	29
Tabel 4.2 Struktur Ekonomi Kabupaten Pati (2024)	35
Tabel 4.3 Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik di Kabupaten Pati 2024	39
Tabel 4.4 Dukungan Partai Politik dalam PILKADA di Kabupaten Pati 2024 ...	39
Tabel 6.1 Anggota Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Kab. Pati	62
Tabel 6.2 Sikap Fraksi DPRD Kab Pati terhadap Penggunaan Hak Angket	64



DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1 Struktur Usia Produktif Penduduk Kabupaten Pati (2024).....	30
Grafik 4.2 Struktur Kelompok Umur Penduduk Kabupaten Pati (2024).....	31
Grafik 4.3 Tingkat Pendidikan Penduduk Kabupaten Pati (2024).....	32
Grafik 4.4 Distribusi Pekerja Kabupaten Pati Berdasarkan Sektor (2025).....	33

